

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks. Hal itu dikarenakan penyelesaian masalah kemiskinan membutuhkan partisipasi dari badan pemerintahan, baik itu badan pemerintah pusat maupun badan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya untuk saling bekerjasama satu sama lain. Masalah kemiskinan di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama terjadi di masyarakat. Kemiskinan terjadi di Indonesia paling parang yaitu pada tahun 1998 akibat dari krisis moneter yang melanda Indonesia.

Data kemiskinan di Indonesia dari tahun 1998-2007 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data Penduduk Miskin**

Tahun	Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1998	49,50	24,23
1999	47,97	23,43
2000	38,70	19,14
2001	37,90	18,14
2002	38,40	18,20
2003	37,30	17,42
2004	36,10	16,66
2005	35,10	15,97
2006	39,30	17,75
2007	37,17	16,58

Kemudian pada tahun 2013-2014 data statistic angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan angka sebagai berikut :

Tahun	Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	28,55	11,47
2014	28,28	11,25

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Dari tabel diatas menunjukkan perkembangan angka kemiskinan di Indonesia yang mengalami penurunan. Namun penurunan angka kemiskinan ini sangat lambat. Meskipun demikian pemerintah maupun lembaga terkait telah melakukan upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan menerapkan berbagai program dalam mengatasi kemiskinan.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu melalui program PNPM Mandiri Perkotaan. Dulu program ini bernama P2KP dan berganti nama menjadi PNPM Mandiri perkotaan sejak 2007. Program ini diluncurkan oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan atau yang sekarang telah berganti nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan dicanangkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka mengatasi kemiskinan di Indonesia. Program dari pengentasan kemiskinan P2KP dilakukan sejak 1999 sebagai upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Budi Yuwono (2010) dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga P2KP-3 terbentuk kurang lebih 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan, 235 kota/kabupaten dan telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 juta orang pemanfaat (penduduk miskin) melalui 243.838 Kelompok swadaya Masyarakat.

Dalam program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin diwilayah kelurahan atau desa yang tergabung didalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dimana program ini tidak menerapkan agunan.

Pinjaman bergulir dalam program PNPM Mandiri Perkotaan ini dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) didalam BKM yang ada disetiap kelurahan. pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK ini tidak selamanya mulus tanpa kendala. Masalah yang sering dihadapi oleh UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir yaitu sering terjadinya kredit macet. Banyak kasus tentang kredit macet yang terjadi dalam pengelolaan pinjaman bergulir, diantaranya seperti yang dimuat di Kedaulatan Rakyat Online menjelaskan tentang 40% pinjaman bergulir PNPM macet “sekitar 40 persen dari total dana pinjaman bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Perkotaan Kabupaten Karanganyar senilai Rp. 7,8 miliar masuk dalam kategori macet”. Selain itu juga ada yang dimuat didalam Suara Merdeka Cetak yang memuat artikel berjudul “Rp 2 Miliar Dana Pinjaman PNPM Macet” disini dijelaskan bahwa di daerah Boyolali terjadi penyelewengan dana PNPM Perkotaan di Boyolali mencapai Rp 300 Juta lebih serta pinjaman macet Rp 2 Miliar lebih.

Dari berbagai kasus tentang kredit macet pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK ini, maka perlu diketahui penanganan yang dilakukan oleh UPK dalam BKM yang diwujudkan dalam sistem pengendalian internnya. Seperti unit usaha lainnya, UPK dalam BKM untuk Provinsi Yogyakarta pasti memiliki sistem pengendalian intern dalam menangani permasalahan kredit macet yang terjadi.

Sistem pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan. Laporan tersebut menurut Mulyadi (2001:164) bertujuan dalam : (a) menjaga keamanan harta yang dimiliki oleh organisasi, (b) memeriksa ketetapan dan kebenaran atau keandalan data akuntansi, (c) meningkatkan atau mendorong efisiensi operasi kegiatan, (d) mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan.

Dari beberapa kasus yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern yang dilakukan UPK diberbagai BKM kemungkinan belum maksimal, hal ini dapat dilihat banyak kredit macet yang terjadi diberbagai

wilayah. Untuk itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut yaitu :

**“PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM PPENGENDALIAN INTERN TERHADAP TINGKAT KREDIT MACET DI UPK (UNIT PENGELOLA KEUANGAN)”**

**B. Batasan Masalah Penelitian**

Untuk menghindari agar permasalahan tidak keluar dari pokok permasalahan yang telah dibuat dalam perumusan masalah maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan menyangkut tentang prosedur pemberian kredit, analisis pengendalian intern dalam pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan standar COSO dan penelitian ini dilakukan di BKM provinsi Yogyakarta serta alat ukur pengukuran sistem pengendalian intern yang digunakan yaitu sistem pengendalian menurut COSO.

**C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap tingkat kredit macet?
2. Apakah penaksiran resiko berpengaruh terhadap tingkat kredit macet?
3. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap tingkat kredit macet?

4. Apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap tingkat kredit macet?
5. Apakah pemantauan berpengaruh terhadap tingkat kredit macet?

#### **D. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal seperti :

1. Mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian terhadap tingkat kredit yang terjadi.
2. Mengetahui pengaruh penaksiran resiko terhadap tingkat kredit yang terjadi.
3. Mengetahui pengaruh aktivitas pengendalian terhadap tingkat kredit yang terjadi.
4. Mengetahui pengaruh informasi dan komunikasi terhadap tingkat kredit yang terjadi.
5. Mengetahui pengaruh pemantauan terhadap tingkat kredit yang terjadi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Yogyakarta  
Sebagai masukan bagi pihak manajemen UPK dalam kaitannya memaksimalkan pengendalian intern untuk membantu mencapai tujuan unit dalam prosedur pemberian kredit dan pengelolaan kredit.
2. Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan sarana penerapan ilmu yang telah diterima secara teoritis dalam perkuliahan kedalam dunia nyata serta bahan pertimbangan untuk penelitian lainnya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi dan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya yang lebih kompleks.